



Universitas Islam Sultan Agung
Semarang

PROSIDING

Seminar Nasional
"PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
UNTUK INDONESIA"

SEMARANG
28 NOVEMBER 2012

Diselenggarakan Oleh :
Himpunan Mahasiswa Teknik Perencanaan
Wilayah dan Kota Unissula

UNISSULA Press
2012



Prosiding Seminar Nasional

“Pembangunan Berkelanjutan untuk Indonesia”

Rabu 28 November 2012

ISBN 978-602-7525-24-5

Diselenggarakan oleh:



Himpunan Mahasiswa Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas Teknik
Universitas Islam Sultan Agung
Semarang

Didukung oleh:



Alamat: Jl. Alamanda B. 329 Bukit Diponegoro Tembalang Semarang
Telp. (024) 70767510 E-Mail : tunaskonsultan@yahoo.com

Kata Pengantar : No. 222 Tanggal 29 Desember 2011
Kata Pengantar : No. 01 Tanggal 02 Mei 2012
Isi : 01-233-133-1-147-000

KATA PENGANTAR

Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) adalah pembangunan yang berguna untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan saat ini tanpa perlu merusak atau menurunkan kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pada dasarnya konsep ini merupakan strategi pembangunan yang memberikan batasan pada laju pemanfaatan ekosistem alamiah dan sumberdaya yang ada didalamnya. Ambang batas ini tidak absolut (mutlak) tetapi merupakan batas yang luwes (flexible) yang bergantung pada teknologi dan sosial ekonomi tentang pemanfaatan sumberdaya alam, serta kemampuan biosfer dalam menerima akibat yang ditimbulkan dari kegiatan manusia.

Dengan kata lain, pembangunan berkelanjutan adalah semacam strategi dalam pemanfaatan ekosistem alamiah dengan cara tertentu sehingga kapasitas fungsionalnya tidak rusak untuk memberikan manfaat bagi kehidupan umat manusia.

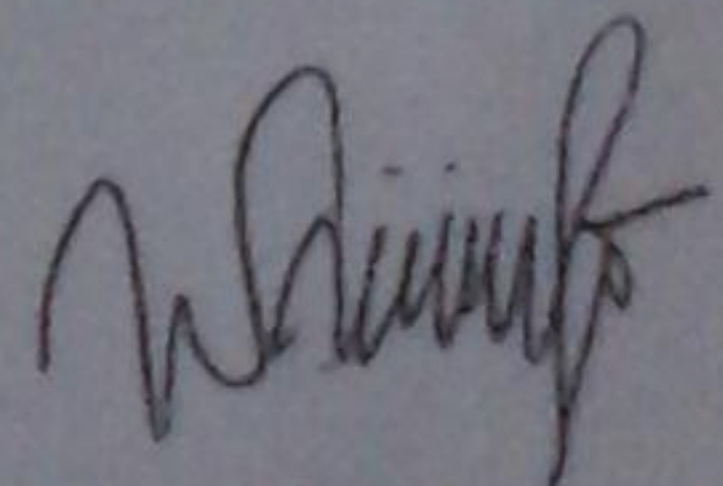
Hal ini bukan saja untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, tetapi juga untuk kesejahteraan masyarakat generasi mendatang. Dengan demikian diharapkan bahwa kita tidak saja mampu melaksanakan pengelolaan pembangunan yang ditugaskan, tetapi juga dituntut untuk mampu mengelolanya dengan suatu lingkup yang lebih menyeluruh.

Dalam rangka meninjau fenomena tersebut, Himpunan Mahasiswa Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Unissula menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tema "Pembangunan Berkelanjutan untuk Indonesia". Seminar Nasional ini bertujuan agar peserta Seminar Nasional dapat mengetahui pentingnya pembangunan kota yang berkelanjutan di Indonesia.

Atas kerjasama yang baik dan bantuan dari semua pihak dalam menyelesaikan Seminar Nasional "Pembangunan Berkelanjutan untuk Indonesia" ini, panitia mengucapkan terima kasih.

Semarang, November 2012

Ketua Panitia



Widianto

DAFTAR ISI

1. Pembangunan Kota yang Berkelanjutan <i>Prof. Ir. Eko Budiharjo, M.Sc.</i>	1
2. Upaya Menciptakan Kota Tematik di Indonesia <i>Prof. Ir. Totok Roesmanto, M.Eng.</i>	15
3. Pembangunan Sumber Daya Air "Terintegrasi dan Berkelanjutan" <i>Tri Hardono</i>	26
4. Konsep Penataan Ruang secara Islami <i>Ir. M Agung Ridlo, MT</i>	33
5. Dimensi Sosial Masyarakat <i>Ir. Eppy Yuliani, MT</i>	40
6. Konsep Mitigasi Bencana Alam dalam Mendukung Program Pembangunan Berkelanjutan di Kota Semarang <i>Dr. Ir. H Soedarsono, M.Si dan Abied Rizky, ST</i>	45
7. Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Kota Hijau Purbalingga sebagai Wujud Kepedulian terhadap Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia <i>Mila Karmilah, ST, MT</i>	60

DIMENSI SOSIAL MASYARAKAT SEBAGAI INDIKATOR PEMBANGUNAN PERDESAAN YANG BERKELANJUTAN

Disusun oleh : Eppy Yuliani

(Dosen Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik UNISSULA)

Abstrak

Pembangunan perdesaan yang memberdayakan masyarakat desa akan merupakan modal sosial dalam pembangunan berkelanjutan. Karena keberdayaan masyarakat inilah yang akan meningkatkan kemandirian, rasa percaya diri yang besar dengan tidak menggantungkan kepada pihak-pihak luar dalam hal pemasokan produksi dan pemasarannya.

Berbagai permasalahan dalam pembangunan perdesaan menjadi hambatan sekaligus tantangan menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Makalah ini membahas dimensi sosial masyarakat yang merupakan indikator dalam pembangunan perdesaan yang berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Pembangunan wilayah dipandang sebagai suatu proses perubahan, yang perlu pemahaman berbagai aspek keseimbangan kebutuhan antar wilayah dan antar dimensi waktu baik sekarang maupun waktu masa depan.

Dalam konsep Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) adalah pembangunan yang berguna untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan saat ini tanpa perlu merusak atau menurunkan kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Terkait dengan pemahaman pembangunan berkelanjutan, pembangunan wilayah perdesaan harus mampu meningkatkan kualitas kehidupan secara umum, yaitu : meningkatkan tingkat pendidikan, pendapatan/kesejahteraan dan derajat kesehatan masyarakat. Dalam hal ini konsep lingkungan hidup dan kelangsungan hidup masyarakat antar wilayah harus terintegrasi dalam satu kesatuan. Kompensasi terhadap generasi mendatang oleh generasi sekarang adalah dalam bentuk : peningkatan modal manusia (*human capital*), modal sosial (*social capital*) modal produksi (*manufacturing capital*) dan modal sumberdaya alam (*natural capital*).

Secara garis besar pembangunan berkelanjutan memiliki dimensi sosial, dimensi lingkungan hidup, dimensi ekonomi dan dimensi kelembagaan.

Keempat dimensi tersebut merupakan indikator dari keberhasilan pengembangan wilayah yang berkelanjutan.

Ruang lingkup materi makalah ini dibatasi meliputi : masyarakat sebagai dimensi sosial dalam konsep Pembangunan perdesaan yang berkelanjutan.

MASYARAKAT SEBAGAI MODAL SOSIAL PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Pembangunan berkelanjutan tidak hanya meliputi pembangunan fisik saja, melainkan juga pembangunan sosial. Pembangunan Sosial sebagai pendekatan pembangunan yang bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan manusia secara paripurna, yakni memenuhi kebutuhan manusia yang terentang mulai dari kebutuhan fisik sampai sosial

Dalam konteks keruangan, pembangunan tidak lepas daripada kondisi suatu wilayah. Dimana kondisinya wilayah satu dengan yang lainnya memiliki karakter yang berbeda.

Menurut Karmaji (2010) , Indikator pembangunan wilayah hendaknya mengikuti beberapa karakteristik sebagai berikut :

1. Menjembatani berbagai prinsip pembangunan wilayah sekaligus menunjukkan adanya integrasi antar elemen dan prinsip pembangunan wilayah tersebut.
2. Berfokus pada efek aktual (actual outcomes) daripada tindakannya.
3. Berujung pada kegiatan praktis berdasarkan kejadian nyata.
4. Mengarah terciptanya inovasi.
5. Tersedianya pengukuran yang relevan sampai pada administrasi pemerintahan yang lebih rendah.
6. Menggambarkan sudut pandang yang menyeluruh terhadap pembangunan wilayah yang berkelanjutan.
7. Memiliki kemampuan ilustratif untuk menunjukkan pola perubahan antar waktu (trend).

Untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan diperlukan 4 (empat) modal yaitu :

- Modal manusia (human capital), yang berupa kemampuan sumberdaya manusia ;
- modal sumber daya alam (natural capital) yang meliputi semua potensi sumberdaya alam baik hayati maupun non hayati;
- modal produksi (manufactured capital) berupa finansial dan teknologi produksi;
- modal sosial (social capital) berupa sikap percaya , toleransi, kelompok, dan jejaring yang dimiliki setiap individu dalam masyarakat.

Modal sosial merupakan pelengkap dari tiga modal pembangunan yang selama ini berkembang. Dalam hal ini masyarakat akan secara mandiri membentuk jejaring dan berbagi

nilai, norma dan kesepahaman yang akan memfasilitasi kerjasama antar individu dan kelompok dalam kehidupan bermasyarakat.

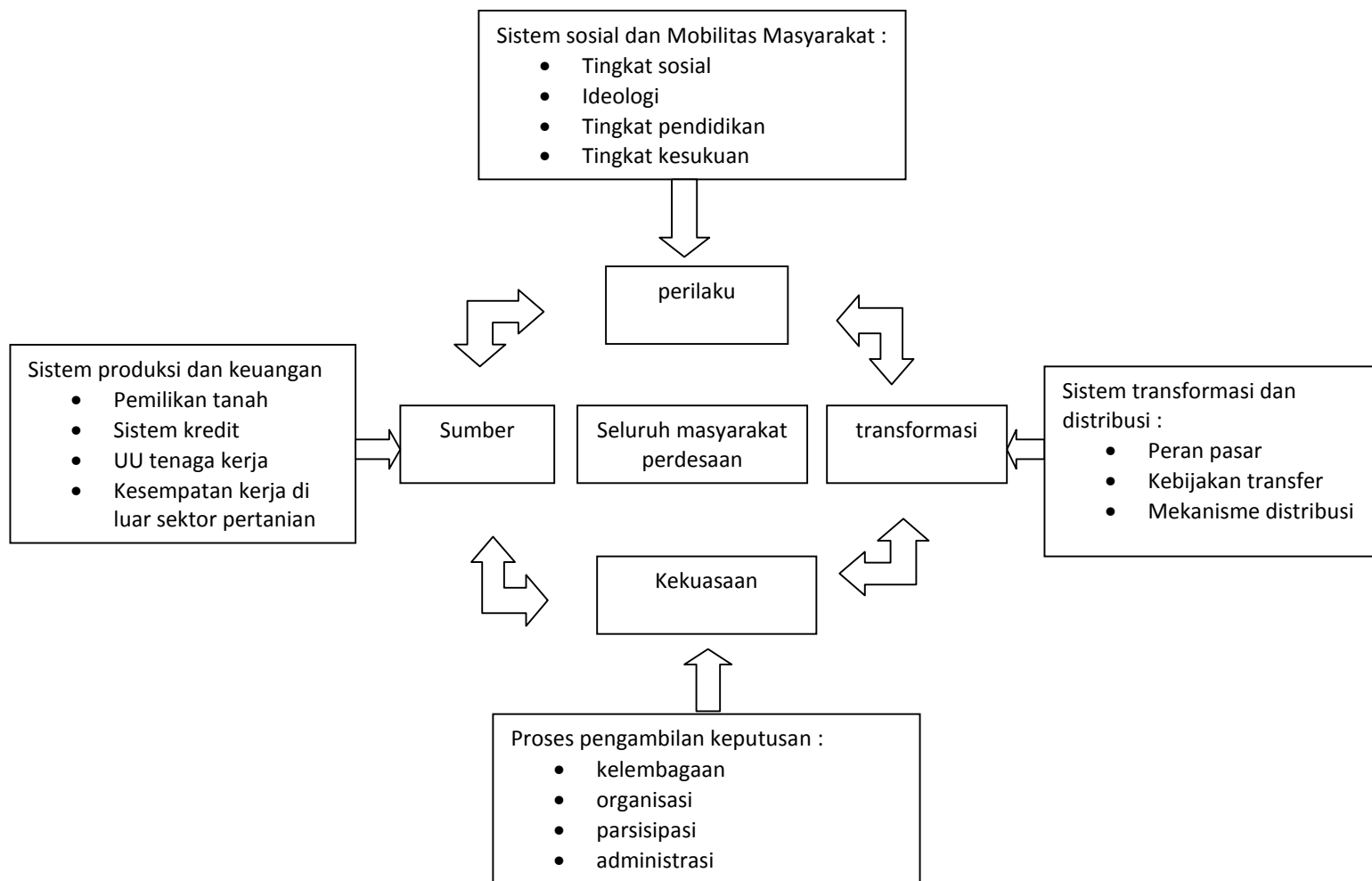
MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN PERDESAAN YANG BERKELANJUTAN

Menurut Bintarto (1989) Desa adalah hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya hasil perpaduan ini adalah suatu wujud atau penampakan dimuka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dalam hubungannya dengan daerah/wilayah lain. Ditinjau dari pengertian tersebut menunjukkan ada tiga aspek utama yaitu manusia /masyarakat, alam dengan lingkungannya, serta aktivitas/tata kehidupan. Tata kehidupan tersebut tidak dapat dilepaskan dari seluk beluk usaha penduduk untuk mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraannya.

Menurut Daldjoeni (1998) setiap desa memiliki “*geographical setting*” dan “*human effortnya*” masing-masing yang berbeda. Ada desa yang bersumber daya menguntungkan tetapi semangat membangun, ketrampilan dan pengetahuan masyarakatnya serba kurang, sehingga desa tersebut tak dapat maju. Sebaliknya ada desa yang meski sumber dayanya serba terbatas, tetapi dapat maju ekonominya, berkat kemampuan penduduknya mengatasi berbagai hambatan alam lain, dipengaruhi oleh unsur-unsur geografis wilayah yang ditempati.

Sedangkan Khairudin (1992) menyatakan karakteristik perdesaan adalah unsur perdesaan yang memberikan kekhususan dan perbedaan sehingga menjadi ciri wilayah perdesaan secara umum terdiri atas pekerjaan (*accupation*), ukuran masyarakat (*size of community*), kepadatan penduduk (*density of population*), lingkungan (*environment*), kehidupan sosial masyarakat.

Salah satu konsep yang digunakan untuk pembangunan perdesaan yang berkelanjutan adalah pembangunan perdesaan yang terintegrasi (Integrated Rural Development-IRD), seperti proses berikut ini.



Sumber : Manig, W.1985 dalam Ananda , Candra F.2000

Dari diagram tersebut diatas menunjukkan bahwa aspek ekonomi digambarkan pada sistem produksi yang ada pada masyarakat. Dengan pengembangan beberapa subsistem elemen tersebut , diharapkan dapat mempengaruhi arah pembangunan perdesaan.

Aspek sosial dapat ditunjukkan untuk menggambarkan kondisi sosial masyarakat dari segi ideologi, pendidikan serta etnis. Masyarakat hendaknya dilibatkan dalam keputusan pembangunan melalui perencanaan ‘botom up’, dengan demikian menunjukkan peran aspek sosial dalam pembangunan perdesaan

Aspek politik ditunjukkan dalam proses pembelajaran politik bagi masyarakat luas (perdesaan) dalam hal satu sisi utamanya fungsi kontrol, sedangkan sisi lain menunjukkan peran pemerintah dan negara dalam hal penyelenggaraan negara. Peran pemerintah cukup besar, karena memiliki peran ganda baik kedalam maupun keluar. Untuk hal tersebut perlu pembagian kekuasaan dari pemerintah dan masyarakat terutama dalam proses pembuatan

kebijakan. perlunya penataan organisasi, kelembagaan serta administrasi pembangunan di pedesaan. Disinilah partisipasi masyarakat sangat diperlukan.

Aspek lingkungan menyangkut kebijakan publik terutama yang tidak mampu ditangani oleh prinsip pasar, yaitu eksternalitas. Dalam hal ini ditekankan pada aspek transfer dan pajak. Perlu dicari bentuk terbaik agar kebijakan yang muncul tidak mematikan kegiatan ekonomi. beberapa aspek transfer dan pajak memerlukan persyaratan seperti transparansi, akuntabilitas, konsistensi, dan sebagainya. Dengan demikian adanya aspek ini diharapkan pembangunan yang dicapai secara susah payah dapat berkelanjutan.

PENUTUP

Pada dasarnya dalam mewujudkan pembangunan pedesaan yang berkelanjutan sangat diperlukan partisipasi masyarakat yang besar yang berperan sebagai modal sosial. Dalam era otonomi daerah memberikan keleluasaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Melalui model pembangunan pedesaan yang terintegrasi, diharapkan mampu membangkitkan kesadaran masyarakat dalam membangun desanya dan terwujudnya kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat, menuju masyarakat mandiri dengan tetap memiliki kearifan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, Candra F. 2000. Pembangunan Pedesaan dan Partisipasi, Lembaga Penelitian Fakultas Ekonomi, Universitas Bawidjaya. Malang
- Bintarto, 1989. Metode Analisa Geografi. LP3ES. Jakarta
- Daljoeni, 1998. Interaksi Desa Kota. Gajah Mada Press. Yogyakarta
- Inayah, 2012. Peranan Modal Sosial dalam Pembangunan. Jurnal Pengembangan Humaniora. Volume 12 , April 2012. www.polines.ac.id
- Karmadji, 2010. Perspektif Pembangunan Wilayah Berkesinambungan. Esensi Erlangga Group. Jakarta.